

**LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN BUKIK BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN**

BANJA LOWEH, Januari 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 telah dapat disusun Sesuai Dengan Ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Camat Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pengguna Anggaran berkewajiban Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Bupati Selaku Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dalam Hal ini adalah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai entitas Akutansi atas Pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan, Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pelaporan APBD tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang terdiri Dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Penyusunan Laporan Keuangan, Khususnya Neraca telah berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meskipun belum sempurna Informasi yang disajikan didalamnya telah di sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan

Demikianlah laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya, sehingga diharapkan melalui media Pelaporan ini dapat Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Banja Loweh, Januari 2020

CAMAT BUKIK BARISAN



WARDI, S.Pd.M.Pd

NIP. 19651222-198603 1 005

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2019 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banja Loweh, Januari 2020

CAMAT BUKIK BARISAN



WARDI, S. Pd. M. Pd

NIP. 19651222 198603 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii-iv
LRA Konversi	iv
NERACA	v
LO.....	vi
LPE.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Ekonomi Makro	
2.2 Kebijakan Keuangan	
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan

Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Neraca

5.3. Laporan Operasional.....

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran A : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan
Bukik Barisan 2019

Lampiran B : Rekapitulasi Pajak 2019

Lampiran C : Rekapitulasi Penerimaan 2019

Lampiran D : Buku Inventaris Per 31 Desember 2019

Lampiran F : Rincian Belanja Modal tahun 2019

Lampiran G : Rincian Penyusutan Aset

Lampiran H : SPJ Belanja Fungsional Per 31 Desember 2019

Lampiran I : Copy Bukti Setoran Sisa Kas Bukik Barisan Tahun 2019

Lampiran J : Rekapitulasi Hutang Jangka Pendek tahun 2019

Lampiran K : Daftar persediaan hingga Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ Kurang	%
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4.1.1	Pajak Daerah					
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	9.327.000,00	88,83
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah					
	JUMLAH PENDAPATAN	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	9.327.000,00	88,83
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.1	Belanja Pegawai	1.207.895.102,00	1.169.043.583,00	96,78	38.851.519,00	3,22
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.207.895.102,00	1.169.043.583,00	96,78	38.851.519,00	3,22
5.2	BELANJA LANGSUNG					
5.2.1	Belanja Pegawai	69.208.000,00	59.346.000,00	85,75	9.862.000,00	14,25
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	486.286.900,00	472.838.500,00	97,23	13.448.400,00	2,77
5.1.3	Belanja Modal	47.200.000,00	46.050.000,00	97,56	1.150.000,00	2,44
5.1.4	Jumlah Belanja Langsung	602.694.900,00	578.234.500,00	95,94	24.460.400,00	4,06
	JUMLAH BELANJA	1.810.590.002,00	1.747.278.083,00	96,50	63.311.919,00	3,50
C	SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.800.090.002,00)	(1.746.105.083,00)	97,00	(53.984.919,00)	3,00



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Permendagri 64/2013)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1	Pajak Daerah-LRA				1.530.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah				
	JUMLAH PAD	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	1.530.000,00
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.1	Belanja Pegawai	1.216.803.102,00	1.177.714.583,00	96,79	1.086.223.569,00
5.1.2	Belanja Barang	546.586.900,00	523.513.500,00	95,78	573.697.965,00
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-
5.1.6	Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	1.763.390.002,00	1.701.228.083,00	96,47	1.659.921.534,00
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.1	Belanja Tanah	-			
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	47.200.000,00	46.050.000,00	97,56	43.118.000,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				21.950.000,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				-
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				-
	Jumlah Belanja Modal	47.200.000,00	46.050.000,00	97,56	65.068.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.810.590.002,00	1.747.278.083,00	96,50	1.724.989.534,00
C	SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.800.090.002,00)	(1.746.105.083,00)	97,00	(1.723.459.534,00)




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
KECAMATAN BUKIK BARISAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No. Akun	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara Kas		
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.05	Kas Dana Kapitasi JKN		
1.1.3	Piutang Pendapatan		
1.1.3.01	Piutang Pajak		
1.1.3.02	Piutang Retribusi		
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba atas PM pada Perush.Milik Swasta		
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.3.04.15	Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades		
1.1.3.04.16	Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir		
1.1.3.04.17	Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir		
1.1.3.04.18	Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS		
	Piutang Lainnya		
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
1.1.5	Penyisihan Piutang		
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak		
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.5.01.03	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.7	Persediaan		
	Jumlah Aset Lancar	-	-
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.1.06.01	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	660.891.053,00	614.841.053,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	629.554.550,00	629.554.550,00
1.3.4	Jalan, Ingasi dan Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	-	-
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	- Gedung		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(697.233.858,84)	(630.418.657,89)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(530.628.863,71)	(475.754.938,71)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(166.304.995,13)	(154.463.719,18)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JIJ	(300.000,00)	(200.000,00)
	Jumlah Aset Tetap	626.211.744,16	646.976.945,11
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.4	Aset Lain-lain		
1.5.4.01	Aset lain-lain		
1.5.4.01.01	Aset lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)		
1.5.4.01.02	Aset lain-lain (Rasak Berat)		
1.5.4.01.03	Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud)		
1.5.4.01.04	Aset lain-lain (Tanah Sewa)		
1.5.4.01.05	Aset lain-lain (BM Prop.)		
1.5.4.01.06	Aset lain-lain (BM Negara.)		
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	626.211.744,16	646.976.945,11
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga		
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka		
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.04.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	107.340,00	307.840,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	107.340,00	307.840,00
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS		
3.1.1	Ekuitas		
3.1.1.01	Ekuitas		
3.1.1.01.01	Ekuitas	626.104.404,16	646.669.105,11
	JUMLAH EKUITAS	626.104.404,16	646.669.105,11
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	626.211.744,16	646.976.945,11

Banjarenew, Januari 2020
CAMAT BUKIK BARISAN
WARDI.S.Pd.M.Pd
NIP. 19651220198603 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

KODE AKUN	Uraian	2019	2018	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.173.000,00	1.530.000,00	(357.000,00)	(23,33)
8.1.1	Pajak Daerah-LO		-		
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	1.173.000,00	1.530.000,00		
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-		
8.1.4	Lain-lain PAD yang Syah		-		
	JUMLAH PAD	1.173.000,00	1.530.000,00	+	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.173.000,00	1.530.000,00		
9	BEBAN	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31	32.778.893,64	1,89
9.1	BEBAN OPERASI	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31	32.778.893,64	1,89
9.1.1	Beban Pegawai	1.177.714.583,00	1.086.223.569,00	91.491.014,00	8,42
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	523.313.000,00	573.917.565,00	(50.604.565,00)	(8,82)
9.1.3	Beban Bunga				
9.1.4	Beban Subsidi				
9.1.5	Beban Hibah			-	
9.1.6	Beban Sosial			-	
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	66.815.200,95	74.922.756,31	(8.107.555,36)	(10,82)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang			-	
9.1.9	Beban Lain-Lain			-	
9.2	BEBAN TRANSFER				
	JUMLAH BEBAN	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31	32.778.893,64	1,89
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	(1.766.669.783,95)	(1.733.533.890,31)	(33.135.893,64)	1,91

Banjoraja, Januari 2020
CAMAT BUKIK BARISAN

WARDI, S.Pd.M.Pd
NIP. 196512201986031005

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

KODE AKUN	Uraian	2019	2018	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.173.000,00	1.530.000,00	(357.000,00)	(23,33)
8.1.1	Pajak Daerah-LO	-	-		
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	1.173.000,00	1.530.000,00	(357.000,00)	(23,33)
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
8.1.4	Lain-lain PAD yang Syah	-	-		
	JUMLAH PAD	1.173.000,00	1.530.000,00	(357.000,00)	(23,33)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER				
8.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
8.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-		
8.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-		
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum	-	-		
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	-	-		
8.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
8.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	-	-		
8.2.2.03	Dana Penyesuaian	-	-		
8.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	-	-		
8.2.3.01.01	BH Pajak Kendaraan Bermotor	-	-		
8.2.3.01.02	BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-		
8.2.3.01.03	BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-		
8.2.3.01.04	BH Pajak Air Permukaan	-	-		
8.2.3.01.05	BH Pajak Rokok	-	-		
8.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-		
	JUMLAH TRANSFER	-	-		
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
8.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		
8.3.2	Pendapatan Dada Darurat	-	-		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.173.000,00	1.530.000,00	(357.000,00)	(23,33)
9	BEBAN	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31	32.778.893,64	1,89
9.1	BEBAN OPERASI	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31	32.778.893,64	1,89
9.1.1	Beban Pegawai	1.177.714.583,00	1.086.223.569,00	91.491.014,00	8,42
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	523.313.000,00	573.917.565,00	(50.604.565,00)	(8,82)
	Beban Persediaan	65.126.900,00	66.539.200,00	(1.412.300,00)	(2,12)
	Beban Jasa	257.363.900,00	334.337.690,00	(76.973.790,00)	(23,02)
	Beban Pemeliharaan	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-
	Beban Perjalanan Dinas	198.282.200,00	170.500.675,00	27.781.525,00	16,29
9.1.3	Beban Bunga	-	-		
9.1.4	Beban Subsidi	-	-		
9.1.5	Beban Hibah	-	-		
9.1.6	Beban Sosial	-	-		
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	66.815.200,95	74.922.756,31	(8.107.555,36)	-
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	-		
9.1.9	Beban Lain-Lain	-	-		
9.2	BEBAN TRANSFER	-	-		
	JUMLAH BEBAN	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31	32.778.893,64	1,89
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	(1.766.669.783,95)	(1.733.533.890,31)	(33.135.893,64)	1,91

Banjara, 10 Januari 2020
CAMAT BUKIK BARISAN
WARDY, S. Pd. M. Pd
NIP. 196512201986031005

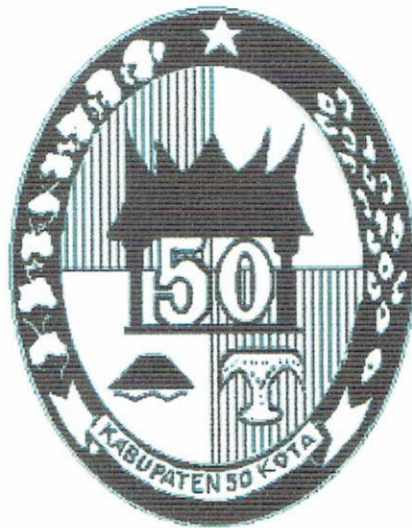
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NOMOR	Uraian	2019	2018
1	Ekuitas Awal	646.669.105,11	656.743.461,42
2	Surplus/defisit - LO	(1.766.669.783,95)	(1.733.533.890,31)
3	R/K PPKD	1.746.105.083,00	1.723.459.534,00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	-
	Koreksi Akm. Penyusutan Pertama kali		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu		
	Mutasi Tambah Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Lainnya		
	Koreksi Akumulasi Penyusutan AT-PM Tahun Sebelumnya		
5	Ekuitas Akhir	626.104.404,16	646.669.105,11

Banja lowen Januari 2020

CAMAT BUKIK BARISAN
 KECAMATAN SUKIK BARISAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NHR 1965-1220 198603 1 005

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN BUKIK BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN**

BANJA LOWEH, Januari 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Bukik Barisan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 tahun 2010 tentang pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecamatan Bukik Barisan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Disamping tugas pokok diatas Kecamatan Bukik Barisan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati
- b. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di kecamatan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemerintahan nagari.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2019 disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2019, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2019 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 Kecamatan Bukik Barisan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Auntansi Pemerintah Berbasis Akruai pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupatenn Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 68 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukik Barisan;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Neraca

5.3 Laporan Operasional (LO)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kecamatan Bukik Barisan diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Bukik Barisan dalam mengelola DPA tahun anggaran 2019 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk Tahun 2019 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan.

2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA

dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Bukik Barisan disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2019, Kecamatan Bukik Barisan menetapkan 9 Program yang didukung oleh 23 Kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 4) Program Peningkatan disiplin Aparatur
- 5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- 7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- 8) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 9) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik..

Ke delapan (9) Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 100%. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi belanjanya dibawah 100 % Diantaranya adalah:

1. Belaja Air dan listrik.

Dari anggaran sebesar Rp. 3.900.000 terealisasi sebesar Rp.2.334.420,- atau 59,86%. Hal tersebut dikarenakan belanja Air dan listrik merupakan belanja yang tidak dapat di perkirakan realisasi penggunaannya setiap bulan.sehingga banyak sisa anggaran yang tidak terserap dalam realisasi sampai dengan Desember 2019.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2019 Kecamatan Bukik Barisan terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah sebagaimana rincian table dibawah ini.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2019

Jenis pendapatan	Target	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	-	-	-
<i>Retribusi Daerah</i>			
<i>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</i>	10.500.000	1.173.000	11,17%
Jumlah	10.500.000	1.173.000	11,17%

Pendapatan Kecamatan Bukik Barisan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.173.000,- Jumlah tersebut mencapai 11,17 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 10.500.000,- Realisasi tidak mencapai target disebabkan karena peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 m².Sementara pada umumnya rumah masyarakat yang mengurus IMB diatas 100² dimana untuk yang diatas 100² kewenangannya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kab.Lima Puluh Kota.

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Kecamatan Bukik Barisan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.747.278.083,- Jumlah tersebut mencapai 96,50 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.810.590.002,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA	1.810.590.002	1.747.278.083	96,50
Belanja Operasi	1.763.390.002	1.701.228.083	96,47
Belanja Pegawai	1.216.803.102	1.177.714.583	96,79
Belanja Barang dan Jasa	546.586.900	523.513.500	95,78
Belanja Modal	47.200.000	46.050.000	97,56
Belanja Modal Peraiatan dan mesin	47.200.000	46.050.000	97,56
Belanja Modal Gedung dan Bagunan	-	-	-

Jumlah	1.810.590.002	1.747.278.083	96,50
--------	---------------	---------------	-------

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.216.803.102,- terealisasi sebesar Rp. 1.177.714.583,- atau sebesar 96,79%.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 546.586.900,- terealisasi sebesar Rp. 523.513.500,- atau sebesar 95,78 %.

Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. 47.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.050.000,- atau sebesar 97,56 %.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti, kendala yang ditemui adalah :

1. Keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Bukik Barisan yang menyebabkan Kegiatan dan Program yang sedang dan akan berjalan mengalami keterlambatan.
2. Pencapaian realisasi Pendapatan yang tidak mencapai 100% dari target karena peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 m2.
3. Beberapa kegiatan tidak mencapai realisasi 80 % dari pagu anggaran diantaranya adalah :

- a. Belanja Air dan listrik.

Dari anggaran sebesar Rp. 3.300.000 terealisasi sebesar Rp.1.420.640,- atau 43,05%. dikarenakan belanja Air dan listrik merupakan belanja yang tidak dapat di perkirakan realisasi penggunaannya dalam 1 Tahun Anggaran.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan Tahun 2019, mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setelah disusunnya kebijakan akuntansi tersebut maka laporan Keuangan yang disusun telah ada landasan hukum yang lebih detil dan sempurna demi perbaikan laporan yang disajikan.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2019 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Kecamatan Bukik Barisan sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang di gunakan dalam penyusunan laporan Keuangan adalah basis akuntansi.

- ❖ Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, Belanja dalam laporan realisasi Anggaran.

Pendapatan –LRA meliputi semua penerimaan di KAS Daerah yang menambah Ekuitas dalam priode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam priode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- ❖ Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual. aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- ❖ Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Bukik Barisan adalah sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikoversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal /nilai rupiah piutang yang belum dilunasi .

3. Investasi jangka pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehan, maa dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4. Persediaan :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5. Investasi jangka panjang

Secara umum, investasi jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value)

6. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga harga pembelian biaya pembebasan tanah, biaya dalam rangka perolehan hak, seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. antara lain biaya apraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

8. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.

10. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut.

11. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Pengukuran Biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola maka biaya-biaya yang dapat diperitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk Kontruksi Dalam Pengerjaantersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Kontruksi Dalam Pengerjaan meliputi :

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar oleh kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis Kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima rekening kas umum daerah; atau
2. Diterima OPD ; atau
3. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LO

Pendapatan –LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (telah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Priode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam Priode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau komisi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

NO	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
4.1	Pendapat. Asli Daerah		
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.173.000,00	1.530.000,00
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu, yang terdiri dari :		
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.173.000,00	1.530.000,00
	Sub Jumlah	1.173.000,00	1.530.000,00

Realisasi IMB sebesar Rp 1.173.000 realisasi tersebut telah mencapai 11,17% dari target Pendapatan IMB Kecamatan Bukik Barisan sebesar 10.500.000,-.

Realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh :

1. peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 M2.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB untuk rumah/bangunan yang didirikan

NO	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
5.1	Belanja Operasi	1.701.228.083,00	1.659.921.534,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.177.714.583,00	1.086.223.560,00
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2019 dan 2017. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :		
	- Gaji dan Tunjangan	907.871.445,00	890.275.774,00
	- Tambahan penghasilan PNS	261.172.138,00	186.619.795,00
	- Honorarium PNS	-	-
	- Honorarium Non PNS	-	-
	- Uang Lembur	8.671.000,00	9.328.000,00
	Sub Jumlah	1.177.714.583,00	1.086.223.560,00
5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	523.513.500,00	573.697.965,00

NO	Perkiraan	Realisasi 2019	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa Kecamatan Bukik barisan Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja Bahan Pakai Habis	65.126.900,00	66.539.200,00
- Belanja jasa kantor	48.994.420,00	95.032.640,00
- Belanja Perawatan Kendaran bermotor	68.803.980,00	80.714.950,00
- Belanja cetak dan penggandaan	17.571.000,00	15.391.000,00
- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	7.520.000,00	9.225.000,00
- Belanja Makanan dan minuman	44.450.000,00	52.154.500,00
-Belanja pakaian Dinas dan Atributnya	7.000.000,00	-
- Belanja perjalanan dinas	198.282.200,00	170.500.675,00
- Belanja Pemeliharaan	2.540.000,00	2.540.000,00
- Belanja Kursus,Pelatihan sosialisasi dan Bimbingan Teknis	6.000.000,00	15.300.000,00
- Belanja Honorarium Non Pegawai	-	1.550.000,00
- Honorarium PNS	50.675.000,00	51.300.000,00
- Honorarium Non PNS	6.550.000,00	13.450.000,00
Sub Jumlah	523.513.500,00	573.697.965,00

	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
5.2 Belanja Modal	46.050.000,00	65.068.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Belanja Modai pada Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2019 dan 2018, terealisasi sebesar Rp. 46.050.000,00 dari total Anggaran sebesar 47.200.000,00 atau 97,56 % dari dana yang dianggarkan. Belanja modal tersebut terdiri dari :

	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
5.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.050.000,00	43.118.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun 2019 dan 2018 pada Kecamatan Bukik Barisan , terealisasi sebesar Rp. 46.050.000,00 dari total Anggaran sebesar 47.200.000 atau 97,56 % dari dana yang dianggarkan, Belanja modal tersebut terdiri dari :

- BM Pengadaan mesin potong	0	3.000.000,00
- BM Komputer/ Laptop	0	3.938.000,00
- BM Pengadaan Printer/ploter	0	3.500.000,00
- BM Pongadaan Moja rapat	0	12.780.000,00
- BM Pengadaan kursi kerja pejabat	0	10.000.000,00
--BM Lemari Arsip	0	9.900.000,00

NO	Perkiraan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
	- BM Pengadaan alat kantor lainnya(Pingger Print)	5.675.000,00	-
	- BM Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.500.000,00	-
	- BM Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	975.000,00	-
	- BM Pengadaan Lemari Arsip Pejabat	23.900.000,00	-
	Jumlah	46.050.000,00	43.118.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	21.950.000,00
	Tidak ada realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan Kantor Camat Bukik Barisan tahun 2019.		
	Total Belanja Modal	46.050.000,00	65.068.000,00

5.2 Neraca

NO	PERKIRAAN	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara kas		
1.1.1.02	Kas di Bendh. Penerima	-	-
	Tidak ada Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas Daerah pada Tahun 2019 dan 2018.		
1.1.1.03	Kas di Bend. Pengeluaran	-	-
	Kas di Bend. Pengeluaran.		
	Tidak ada kas di bendahara pengeluaran Tahun 2019 karena sisa kas yang ada telah disetorkan ke kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2019.		
1.1.7	Persediaan	-	-
	Tidak ada persediaan di Kecamatan Bukik Barisan setelah tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 .		
		Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
1.3	Aset Tetap	626.211.744,16	646.976.945,11
1.3.1	Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai Kecamatan Bukik Barisan pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018.		
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	660.891.053,00	614.841.053,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dan dikuasai oleh Kecamatan Bukik Barisan pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :		
	SALDO AWAL (Audited 31 Desember 2018)	614.841.053,00	
	Mutasi tambah		
	Belanja Modal tahun 2019	46.050.000,00	

NO	PERKIRAAN	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Kapitalisasi Belanja barang dan Jasa berupa		
	pengadaan Gerobak	480.000,00	
	Jumlah	661.371.053,00	
	Mutasi Kurang		
	Mutasi ke aset ekstrakom berupa pengadaan gerobak	(480.000,00)	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	660.891.053,00	
	Adanya mutasi tambah berupa :		
	1. Terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin pada Tahun 2019 sebesar Rp. 46.050.000,- yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari		
	a. 1 Unit Pingger Print	Rp. 5.675.000,-	
	b. 5 Unit Meja Kerja	Rp. 15.500.000,-	
	c. 1 Unit Kursi Kerja	Rp. 975.000,-	
	d. 4 Unit Lemari arsip	Rp. 23.900.000,-	
	2. Ada Mutasi kurang berupa Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa berupa pengadaan Gerobak pada tahun 2019 senilai 480.000,-.		
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.3.3.	Gedung & Bangunan	629.554.550,00	629.554.550,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Bukik Barisan pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.		
	SALDO AWAL (Audited 31 Desember 2018)	629.554.550,00	
	Mutasi tambah		
	Belanja modal tahun 2019	-	
	Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	-	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	Rp. 629.554.550,00	
	1. Tidak Ada Mutasi tambah pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan kantor pada tahun 2019.		
	2. Tidak ada kapitalisasi belanja barang dan jasa menjadi asset gedung dan bangunan pada tahun 2019 .		
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Bukik Barisan pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018 Dengan rincian sebagai berikut:		
	SALDO AWAL (Audited 31 Desember 2018)	Rp. 3.000.000,00	
	Mutasi tambah		
	Kapitalisasi Belanja modal tahun 2019	-	
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2019	-	

NO	PERKIRAAN	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	-	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	Rp. 3.000.000,00	
1.3.5	Tidak ada Kapitalisasi Barang dan Jasa menjadi asset jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2019 Aset Tetap Lainnya	-	-
	Tidak terdapat aset tetap lainnya pada Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2019 dan 2018.		
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan aset tetap	(697.233.858,84)	(630.418.657,89)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut :		
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	(530.628.863,71)	(475,754,938,71)
	- Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(166.304.995,13)	(154,463,719,18)
	- Akumulasi penyusutan asset Jalan, Irigasi dan jaringan	(300.000,00)	(200.000,00)
	Total penyusutan aset tetap	(697.233.858,84)	(630.418.657,89)
	Aset lainnya	-	-
	Tidak ada pengurangan aset lainnya pada Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2019.		
2.	KEWAJIBAN		
2.1	Kewajiban Jangka pendek	107.340,00	307.840,00
2.1.6.04.01	Utang jangka pendek lainnya	107.340,00	307.840,00
	Terdapat utang jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu berupa Rekening listrik Kantor Bulan Desember 2019 dengan rincian :		
	1. Rekening Listrik kantor	107.340,00	307.840,00
	Total Kewajiban	107.340,00	307.840,00
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
3.	EKUITAS		
3.1	EKUITAS	626.104.404,16	646,669,105,11
	Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Kecamatan Bukik Barisan per 31 Desember 2019		

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
8.	Pendapatan	1.173.000,00	1.530.000,00
	Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan retribusi darah- LO dalam tahun anggaran 2019 dan tahun 2018. Jumlah Beban-LO tersebut terinci sebagai berikut :		
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
9.	Beban	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31
	Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2015 dan tahun 2014. Jumlah Beban-LO tersebut terinci sebagai berikut :		
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
9.1	Beban Operasi	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31
9.1.1	Beban Pegawai	1.177.714.583,00	1.086.223.569,00
	Jumlah tersebut merupakan beban pegawai dalam tahun anggaran 2019 dan 2017 jumlah realisasi beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:		
	Gaji dan tunjangan	907.871.445,00	890.275.774,00
	Tambahan Penghasilan	261.172.138,00	196.610.795,00
	Uang Lembur PNS	8.671.000,00	9.328.000,00
	Jumlah Beban Pegawai	1.177.714.583,00	1.086.223.569,00
9.1.2	Beban Barang dan jasa	523.313.000,00	573.917.565,00
	Jumlah tersebut merupakan beban Barang dan Jasa dalam tahun anggaran 2019 dan 2017 jumlah realisasi beban Barang dan Jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut:		
	Beban Persediaan	65.126.900,00	66.539.000,00
	Beban Jasa	257.363.900,00	334.337.690,00
	Beban Pemeliharaan	2.540.000,00	2.540.000,00
	Belanja Perjalanan dinas	198.282.200,00	170.500.675,00
	Sub jumlah	523.312.500,00	573.917.565,00
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
9.1.7	Beban penyusutan dan amortisasi	66.815.200,95	74.922.756,31
	Jumlah tersebut merupakan penyusutan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2019		
	- Beban penyusutan peralatan mesin	51.873.925,00	51.140.204,42
	- Beban penyusutan gedung dan bangunan	11.841.275,95	23.682.551,89
	- Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.000,00	100.000,00
	Sub Jumlah	66.815.200,95	74.922.756,31
	JUMLAH BEBAN	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT LO	(1.766.669.783,95)	(1.733.533.890,31)

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas MEMUAT TENTANG:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit-LO
3. R/K PPKD
4. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
5. Ekuitas akhir

Hal tersebut diatas dapat diuraikan dan jelaskan sebagai berikut:

	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1 Ekuitas awal	646.669.105,11	656.743.461,42
	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
Ekuitas awal merupakan kekayaan bersih milik Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 646.669.105,11 yang terdiri dari :		
1. Jumlah aset lancar	-	-
2. Jumlah Infestasi jangka panjang	-	-
3. Jumlah aset tetap	646.669.105,11	656.743.461,42
4. Jumlah aset lainnya	-	-
5. Jumlah Kewajiban	-	-
Jumlah Ekuitas	646.669.105,11	656.743.461,42
2 Surplus/defisit-LO	(1.766.669.783,95)	(1.733.533.890,31)
Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan LO dengan beban-LO per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (1.766.669.283,95).		
3 R/K PPKD	1.746.105.083,00	1.723.459.534,00
R/K PPKD merupakan Selisih belanja definitif dengan pendapatan		
4 Dampak Komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	-
- Koreksi AKM.Penyusutan Pertama Kali	-	-
Penyusutan akumulasi aset tetap pertama kali sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00		
Koreksi Hutang tahun lalu Rp.0,00	-	-
Mutasi Kurang aset Tetap	-	-

Laporan Keuangan Kecamatan Bukik Barisan 2019

Mutasi Kurang aset lainnya	-	-
Koreksi Piutang tahun lalu	-	-
Ekuitas Akhir	626.104.904,16	646.669.105,11

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan, Kecamatan Bukik Barisan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan masih mengacu pada Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 9 tahun 2008 memberikan arahan dan pedoman mengenai keberadaan Kecamatan Bukik Barisan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan semangat Otonomi Daerah

.B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat (Sekretaris Camat).
 - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi PPM
- Seksi Kessos
- Seksi Pelayanan
- Seksi Trantibum

Seluruh Seksi yang ada telah diisi oleh PNS yang telah Memenuhi Syarat secara kepangkatan untuk Mengisinya .

Dalam menjalankan organisasi, seluruh jabatan Struktural pada Kecamatan Bukik Barisan telah diisi dengan komposisi pegawai menurut golongan dan eselon sebagai berikut :

NO	GOL	ESELON		Fungsional Umum	Jumlah
		III	IV		
1	IV/b	1			1
2	IV/a	1	-		1
3	III/d	-	4		4
4	III/ c		1		1
5	III/b			1	1
6	III/a				
7	II/d			1	1
8	II/c			2	2
9	II/b			1	1
10	II/a				

C. Aspek Strategis Kecamatan Bukik Barisan

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Bukik Barisan pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Pemerintahan

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Bukik Barisan Komposisi dari Bulan Januari s/d Desember 2019 Berjumlah 12 orang PNS dan 4 Orang Pegawai Harian Lepas (PHL) .

D. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan yang berarti selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019.

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Bukik Barisan diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut:

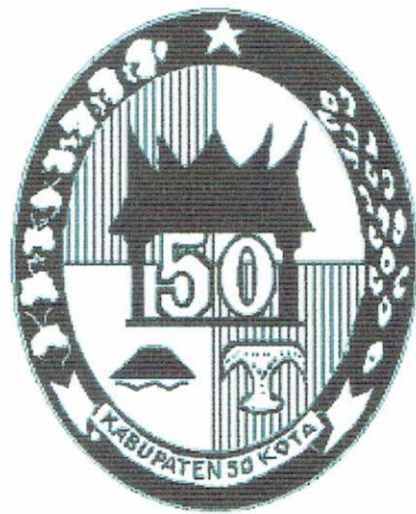
Realisasi Penggunaan sebagai berikut:

- ❖ Total Realisasi belanja Kecamatan Bukik Barisan dalam tahun anggaran 2019 tercatat sebesar Rp 1.747.278.083,- atau 96,50% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.810.590.002,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA	1.810.590.002	1.747.278.083	96,50
Belanja Operasi	1.763.390.002	1.701.228.083	96,47
Belanja Pegawai	1.216.803.102	1.177.714.583	96,79
Belanja Barang dan Jasa	546.586.900	523.513.500	95,78
Belanja Modal	47.200.000	46.050.000	97,56
Belanja Modal Peralatan dan mesin	47.200.000	46.050.000	97,56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	1.810.590.002	1.747.278.083	96,50

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan Dana APBD.

**LAMPIRAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN BUKIK BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN**

BANJA LOWEH, Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 5.XX.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2019 dan 2018

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4.	<u>PENDAPATAN</u>	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	-
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	-
5.	<u>BELANJA</u>	1.810.590.002,00	1.747.278.083,00	96,50	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.207.895.102,00	1.169.043.583,00	96,78	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.207.895.102,00	1.169.043.583,00	96,78	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	602.694.900,00	578.234.500,00	95,94	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	69.208.000,00	59.346.000,00	85,75	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.286.900,00	472.838.500,00	97,23	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	47.200.000,00	46.050.000,00	97,56	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.800.090.002,00)	(1.746.105.083,00)	97,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 5.XX.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2019 dan 2018

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	-
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	-
4.1.2.17.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	-
4.1.2.17.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	-
5.	BELANJA	1.810.590.002,00	1.747.278.083,00	96,50	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.207.895.102,00	1.169.043.583,00	96,78	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.207.895.102,00	1.169.043.583,00	96,78	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	920.829.250,00	907.871.445,00	98,59	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	607.039.414,00	596.317.700,00	98,23	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	48.682.556,00	48.110.237,00	98,82	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	59.849.250,00	58.620.000,00	97,95	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.887.150,00	10.860.000,00	99,75	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	29.330.824,00	29.040.420,00	99,01	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	404.498,00	390.459,00	96,53	-
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	5.827.561,00	5.724.632,00	98,23	-
5.1.1.01.28.	Gaji Ketiga Belas	79.533.872,00	79.533.872,00	100,00	-
5.1.1.01.29.	Tunjangan Hari Raya	79.274.125,00	79.274.125,00	100,00	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	287.065.852,00	261.172.138,00	90,98	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	287.065.852,00	261.172.138,00	90,98	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	602.694.900,00	578.234.500,00	95,94	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	69.208.000,00	59.346.000,00	85,75	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.300.000,00	50.675.000,00	84,04	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	325.000,00	8,33	-
5.2.1.01.03.	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan	3.000.000,00	250.000,00	8,33	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	-
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK	27.000.000,00	23.700.000,00	87,78	-
5.2.1.01.07.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	8.908.000,00	8.671.000,00	97,34	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.908.000,00	8.671.000,00	97,34	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.286.900,00	472.838.500,00	97,23	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.126.900,00	65.126.900,00	95,60	-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.378.900,00	22.378.900,00	100,00	-
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik))	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00	-

Permendagri 13

BADAN KEUANGAN

IRWANDI S Sos MM

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.168.000,00	7.168.000,00	100,00	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	-
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	15.000.000,00	12.000.000,00	80,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.130.000,00	55.544.420,00	86,61	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	900.000,00	402.140,00	44,68	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	1.932.280,00	64,41	-
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikat	100.000,00	100.000,00	100,00	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00	-
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	38.880.000,00	31.860.000,00	81,94	-
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.550.000,00	6.550.000,00	100,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.350.000,00	68.803.980,00	97,80	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.200.000,00	3.663.000,00	70,44	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.400.000,00	21.390.980,00	99,96	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.571.000,00	17.571.000,00	100,00	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.617.000,00	9.617.000,00	100,00	-
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)	1.024.000,00	1.024.000,00	100,00	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.520.000,00	7.520.000,00	100,00	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00	-
5.2.2.10.07.	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.450.000,00	44.450.000,00	100,00	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.950.000,00	40.950.000,00	100,00	-
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	-
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	-
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	198.599.000,00	198.282.200,00	99,84	-
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	169.475.000,00	169.315.000,00	99,91	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.124.000,00	28.967.200,00	99,46	-
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	-
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	47.200.000,00	46.050.000,00	97,56	-
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	5.675.000,00	94,58	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	6.000.000,00	5.675.000,00	94,58	-
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	41.200.000,00	40.375.000,00	98,00	-
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	1.000.000,00	975.000,00	97,50	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet	24.700.000,00	23.900.000,00	96,76	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.800.090.002,00)	(1.746.105.083,00)	97,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 5.XX.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2018 dan 2018

Dalam Rup

kode Bekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	
5.	BELANJA	1.810.590.002,00	1.747.278.083,00	96,50	
5.1.	BELANJA OPERASI	1.763.390.002,00	1.701.228.083,00	96,47	
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.216.803.102,00	1.177.714.583,00	96,79	
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	546.586.900,00	523.513.500,00	95,78	
5.2.	BELANJA MODAL	47.200.000,00	46.050.000,00	97,56	
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.200.000,00	46.050.000,00	97,56	
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.800.090.002,00)	(1.746.105.083,00)	97,00	

Permendagri

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 5.XX.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2018 dan 2018

Dalam Rup

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	
4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	
4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	10.500.000,00	1.173.000,00	11,17	
5.	BELANJA	1.810.590.002,00	1.747.278.083,00	96,50	
5.1.	BELANJA OPERASI	1.763.390.002,00	1.701.228.083,00	96,47	
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.216.803.102,00	1.177.714.583,00	96,79	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	920.829.250,00	907.871.445,00	98,59	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	607.039.414,00	596.317.700,00	98,23	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	48.682.556,00	48.110.237,00	98,82	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	59.849.250,00	58.620.000,00	97,95	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.887.150,00	10.860.000,00	99,75	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	29.330.824,00	29.040.420,00	99,01	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	404.498,00	390.459,00	96,53	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	5.827.561,00	5.724.632,00	98,23	
5.1.1.01.28.	Gaji Ketiga Belas	79.533.872,00	79.533.872,00	100,00	
5.1.1.01.29.	Tunjangan Hari Raya	79.274.125,00	79.274.125,00	100,00	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	287.065.852,00	261.172.138,00	90,98	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	287.065.852,00	261.172.138,00	90,98	
5.1.1.07.	Uang Lembur	8.908.000,00	8.671.000,00	97,34	
5.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	8.908.000,00	8.671.000,00	97,34	
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	546.586.900,00	523.513.500,00	95,78	
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.126.900,00	65.126.900,00	95,60	
5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.378.900,00	22.378.900,00	100,00	
5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00	
5.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.168.000,00	7.168.000,00	100,00	
5.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	
5.1.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	15.000.000,00	12.000.000,00	80,00	
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.580.000,00	48.994.420,00	85,09	
5.1.2.03.02.	Belanja air	900.000,00	402.140,00	44,68	
5.1.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	1.932.280,00	64,41	
5.1.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	100.000,00	100.000,00	100,00	
5.1.2.03.20.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00	
5.1.2.03.21.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	38.880.000,00	31.860.000,00	81,94	

Permendagri

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.350.000,00	68.803.980,00	97,80	
5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.200.000,00	3.663.000,00	70,44	
5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.400.000,00	21.390.980,00	99,96	
5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
5.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.571.000,00	17.571.000,00	100,00	
5.1.2.06.01.	Belanja cetak	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00	
5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.617.000,00	9.617.000,00	100,00	
5.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan(non cetak cover)	1.024.000,00	1.024.000,00	100,00	
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.520.000,00	7.520.000,00	100,00	
5.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00	
5.1.2.10.07.	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.450.000,00	44.450.000,00	100,00	
5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.950.000,00	40.950.000,00	100,00	
5.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	
5.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
5.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
5.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	198.599.000,00	198.282.200,00	99,84	
5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	169.475.000,00	169.315.000,00	99,91	
5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.124.000,00	28.967.200,00	99,46	
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	
5.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
5.1.2.23.02.	Belanja sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
5.1.2.25.	Honorarium PNS	60.300.000,00	50.675.000,00	84,04	
5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	325.000,00	8,33	
5.1.2.25.04.	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	3.000.000,00	250.000,00	8,33	
5.1.2.25.05.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	
5.1.2.25.06.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
5.1.2.25.07.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK	27.000.000,00	23.700.000,00	87,78	
5.1.2.25.08.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	6.550.000,00	6.550.000,00	100,00	
5.1.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	6.550.000,00	6.550.000,00	100,00	
5.2.	BELANJA MODAL	47.200.000,00	46.050.000,00	97,56	
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.200.000,00	46.050.000,00	97,56	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	5.675.000,00	94,58	
5.2.2.14.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	5.675.000,00	94,58	
5.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	41.200.000,00	40.375.000,00	98,00	
5.2.2.17.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	
5.2.2.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.000.000,00	975.000,00	97,50	
5.2.2.17.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	24.700.000,00	23.900.000,00	96,76	
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.800.090.002,00)	(1.746.105.083,00)	97,00	

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : 5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
 Pengguna Anggaran : WARDI, S.Pd, M.Pd
 Bendahara Pengeluaran : H. SUPRAYONDI, S.Sos
 Tahun Anggaran : 2019
 Bulan : Desember

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramng & Jasa				SPJ - UP/GUTU			Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9-12)	14(3-13)	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.207.895.102	1.068.947.607	100.095.976	1.169.043.583	-	-	-	-	-	-	1.169.043.583	38.851.519	
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.207.895.102	1.068.947.607	100.095.976	1.169.043.583	-	-	-	-	-	-	1.169.043.583	38.851.519	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	920.829.250	850.583.905	67.287.540	907.871.445	-	-	-	-	-	-	907.871.445	12.957.805	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	607.039.414	551.106.700	45.211.000	596.317.700	-	-	-	-	-	-	596.317.700	10.721.714	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	48.682.556	44.523.989	3.588.248	48.110.237	-	-	-	-	-	-	48.110.237	572.319	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	59.849.250	53.780.000	4.840.000	58.620.000	-	-	-	-	-	-	58.620.000	1.229.250	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Fungsional Umum	10.887.150	9.955.000	905.000	10.860.000	-	-	-	-	-	-	10.860.000	27.150	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Beras	29.330.824	26.795.400	2.245.020	29.040.420	-	-	-	-	-	-	29.040.420	290.404	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	404.498	324.212	66.247	390.459	-	-	-	-	-	-	390.459	14.039	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	5.827.561	5.290.607	434.025	5.724.632	-	-	-	-	-	-	5.724.632	102.929	
5.1.1.01.23.	Gaji Ketiga Belas	79.533.872	79.533.872	-	79.533.872	-	-	-	-	-	-	79.533.872	-	
5.1.1.01.23.	Tunjangan Hari Raya	79.274.125	79.274.125	-	79.274.125	-	-	-	-	-	-	79.274.125	-	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	287.065.852	218.363.702	42.808.436	261.172.138	-	-	-	-	-	-	261.172.138	25.893.714	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan bulan kerja	287.065.852	218.363.702	42.808.436	261.172.138	-	-	-	-	-	-	261.172.138	25.893.714	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - S Geji				SPJ - LS Baramig & Jasa				SPJ UP/IGUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/IGUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	6(4+5)	7	8	9(7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	10	11		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9-12)	14(3-13)			
5.2.	BE-LANJA LANGSUNG	602.694.900	-	-	-	-	-	-	484.348.315	93.886.185	578.234.500	578.234.500	24.460.400			
5.xx.5.xx.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	225.820.900	-	-	-	-	-	-	175.831.785	38.291.735	214.123.520	214.123.520	11.697.300			
5.xx.5.xx.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.900.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000	100.000	1.900.000	1.900.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikat	100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.900.000	-	-	-	-	-	-	2.142.085	192.335	2.334.420	2.334.420	1.565.580			
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	900.000	-	-	-	-	-	-	327.345	74.795	402.140	402.140	497.800			
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000	-	-	-	-	-	-	1.814.740	117.540	1.932.280	1.932.280	1.067.720			
5.xx.5.xx.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.100.000	-	-	-	-	-	-	49.787.000	5.668.000	55.455.000	55.455.000	9.645.000			
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	325.000	325.000	325.000	3.575.000			
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium pejabat per erima hasil pekerjaan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	250.000	2.750.000			
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	11.400.000	-	-	-	-	-	-	10.450.000	950.000	11.400.000	11.400.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	6.000.000	-	-	-	-	-	-	5.500.000	500.000	6.000.000	6.000.000	-			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barami & Jasa				SPJ - UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	6(4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	8	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	10		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.700.000	3.300.000			
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	9.000.000	-	-	-	-	-	-	8.250.000	750.000	9.000.000	9.000.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.800.000	-	-	-	-	-	-	2.612.000	1.188.000	3.780.000	3.780.000	20.000			
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.1.5.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000	-	-	-	-	-	-	750.000	250.000	1.000.000	1.000.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.08.	Penyediaan jasa ket.arsihan kantor	21.868.000	-	-	-	-	-	-	16.500.000	5.368.000	21.868.000	21.868.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan ket.arsihan dan bahan pembersih	7.168.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	4.168.000	7.168.000	7.168.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	14.700.000	-	-	-	-	-	-	13.500.000	1.200.000	14.700.000	14.700.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.540.000	-	-	-	-	-	-	820.000	1.720.000	2.540.000	2.540.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.23.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.540.000	-	-	-	-	-	-	820.000	1.720.000	2.540.000	2.540.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.235.900	-	-	-	-	-	-	8.635.000	3.600.900	12.235.900	12.235.900	-			
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.235.900	-	-	-	-	-	-	8.635.000	3.600.900	12.235.900	12.235.900	-			
5.xx.5.xx.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan perenggandaan	7.418.000	-	-	-	-	-	-	3.833.000	3.585.000	7.418.000	7.418.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.930.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.430.000	2.930.000	2.930.000	-			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	6(4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan in	s.d. Bulan ini	9(7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	11		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9-12)	14(3-13)			
5.xx.5.xx.01.01.1.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.088.000	-	-	-	-	-	-	2.283.000	1.805.000	4.088.000	4.088.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.1.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)	400.000	-	-	-	-	-	-	50.000	550.000	400.000	400.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.12.	Perediaan komponen instalasi listrik/penerangan barugunan kantor	2.380.000	-	-	-	-	-	-	250.000	2.130.000	2.380.000	2.380.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)	2.380.000	-	-	-	-	-	-	250.000	2.130.000	2.380.000	2.380.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.13.	Perediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000	-	-	-	-	-	-	5.100.000	675.000	5.675.000	5.675.000	325.000			
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	6.000.000	-	-	-	-	-	-	5.100.000	675.000	5.675.000	5.675.000	325.000			
5.xx.5.xx.01.01.17.	Perediaan makanan dan minuman	26.600.000	-	-	-	-	-	-	20.232.500	8.267.500	28.500.000	28.500.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.250.000	-	-	-	-	-	-	19.232.500	8.017.500	27.250.000	27.250.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.250.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	250.000	1.250.000	1.250.000	-			
5.xx.5.xx.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.979.000	-	-	-	-	-	-	66.732.200	7.085.000	73.817.200	73.817.200	161.800			
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.855.000	-	-	-	-	-	-	40.315.000	4.535.000	44.850.000	44.850.000	5.000			
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.124.000	-	-	-	-	-	-	26.417.200	2.550.000	28.967.200	28.967.200	156.800			
5.xx.5.xx.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101.350.000	-	-	-	-	-	-	80.723.530	18.255.450	98.978.980	98.978.980	2.371.020			
5.xx.5.xx.01.02.10.	Pengadaan mebeleur	41.200.000	-	-	-	-	-	-	40.375.000	-	40.375.000	40.375.000	825.000			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramng & Jasa				SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Bulan lalu	Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9-12)	14(3-13)		
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	15.500.000	-	-	-	-	-	-	15.500.000	-	15.500.000	15.500.000	-	-	
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	1.000.000	-	-	-	-	-	-	975.000	-	975.000	975.000	25.000	25.000	
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet	24.700.000	-	-	-	-	-	-	23.900.000	-	23.900.000	23.900.000	800.000	800.000	
5.xx.5.xx.01.02.24.	Pereliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.150.000	-	-	-	-	-	-	40.348.530	18.255.450	58.603.980	58.603.980	1.546.020	1.546.020	
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.03.01.	Belanja Jasa Service	5.200.000	-	-	-	-	-	-	1.586.000	2.075.000	3.663.000	3.663.000	1.537.000	1.537.000	
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.03.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.400.000	-	-	-	-	-	-	8.619.980	12.771.000	21.390.980	21.390.980	9.020	9.020	
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.03.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31.800.000	-	-	-	-	-	-	29.000.000	2.800.000	31.800.000	31.800.000	-	-	
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.03.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.750.000	-	-	-	-	-	-	1.140.550	609.450	1.750.000	1.750.000	-	-	
5.xx.5.xx.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.000.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	-	
5.xx.5.xx.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.000.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	-	
5.xx.5.xx.01.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.000.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	-	
5.xx.5.xx.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.745.000	-	-	-	-	-	-	20.171.000	2.524.000	22.695.000	22.695.000	50.000	50.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramij & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	6(4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	8	9,7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9,7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9-12)	14(3-13)			
5.xx.5.xx.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	22.745.000	-	-	-	-	-	-	20.171.000	2.524.000	22.695.000	22.695.000	50.000			
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.606.000	-	-	-	-	-	-	1.606.000	-	1.606.000	1.606.000	50.000			
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.03.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.200.000	-	-	-	-	-	-	3.850.000	350.000	4.200.000	4.200.000	-			
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.03.02.	Belanja Penggandaan	805.000	-	-	-	-	-	-	255.000	550.000	805.000	805.000	-			
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.03.03.	Belanja Penjiliran (non cetak cover)	624.000	-	-	-	-	-	-	200.000	424.000	624.000	624.000	-			
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.13.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.460.000	-	-	-	-	-	-	14.260.000	1.200.000	15.460.000	15.460.000	-			
1.02.07.5.xx.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Peleasaan	58.065.000	-	-	-	-	-	-	47.835.000	7.350.000	55.185.000	55.185.000	2.880.000			
1.02.07.5.xx.01.15.01.	Pembudayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Peleasaan	58.065.000	-	-	-	-	-	-	47.835.000	7.350.000	55.185.000	55.185.000	2.880.000			
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	12.000.000	-	-	-	-	-	-	9.920.000	2.080.000	12.000.000	12.000.000	-			
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	12.960.000	-	-	-	-	-	-	9.480.000	600.000	10.080.000	10.080.000	2.880.000			
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.000.000	-	-	-	-	-	-	2.900.000	2.100.000	5.000.000	5.000.000	-			
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000	-	-	-	-	-	-	500.000	100.000	600.000	600.000	-			
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.140.000	-	-	-	-	-	-	1.140.000	-	1.140.000	1.140.000	-			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	6(4+5)	7	8	9(7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	11	12(10+11)		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9-12)	14(3-13)			
1.02.07.5.xx.01. 15.01.5.2.2.10. 05.	Belanja sewa tenda	2.520.000	-	-	-	-	-	-	2.520.000	-	-	2.520.000	-	2.520.000	-	
1.02.07.5.xx.01. 15.01.5.2.2.10. 07.	Belanja sewa sound system	5.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	2.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	-	
1.02.07.5.xx.01. 15.01.5.2.2.11. 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.450.000	-	-	-	-	-	-	10.450.000	-	10.450.000	-	-	10.450.000	-	
1.02.07.5.xx.01. 15.01.5.2.2.15. 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.395.000	-	-	-	-	-	-	7.925.000	470.000	8.395.000	-	-	8.395.000	-	
1.02.07.5.xx.01. .17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	12.235.000	-	-	-	-	-	-	11.495.000	725.000	12.220.000	-	-	12.220.000	15.000	
1.02.07.5.xx.01. .17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	12.235.000	-	-	-	-	-	-	11.495.000	725.000	12.220.000	-	-	12.220.000	15.000	
1.02.07.5.xx.01. 17.02.5.2.2.01. 01.	Belanja alat tulis kantor	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000	-	-	250.000	-	
1.02.07.5.xx.01. 17.02.5.2.2.11. 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000	-	-	-	-	-	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	
1.02.07.5.xx.01. 17.02.5.2.2.15. 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.485.000	-	-	-	-	-	-	6.745.000	725.000	7.470.000	-	-	7.470.000	15.000	
1.02.07.5.xx.01. 17.02.5.2.2.18. 02.	Belanja sosialisasi	1.250.000	-	-	-	-	-	-	1.250.000	-	1.250.000	-	-	1.250.000	-	
4.xx.01.5.xx.01. .23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	55.620.000	-	-	-	-	-	-	48.717.000	6.903.000	55.620.000	-	-	55.620.000	4.150.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramng & Jasa				SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	6(4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	7	8	9(7+8)	s.d. Bulan lalu		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9-12)	14(3-13)		
4.xx.01.5.xx.01.23.06.	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	55.820.000	-	-	-	-	-	-	48.717.000	6.553.000	55.670.000	55.670.000	4.150.000		
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.650.000	-	-	-	-	-	-	2.475.000	1.175.000	3.650.000	3.650.000	-		
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	2.750.000	450.000	3.200.000	3.200.000	-		
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pagawai Harian Lepas	25.920.000	-	-	-	-	-	-	20.460.000	1.320.000	21.780.000	21.780.000	4.140.000		
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.400.000	-	-	-	-	-	-	2.525.000	875.000	3.400.000	3.400.000	-		
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000	-	-	-	-	-	-	1.012.000	588.000	1.600.000	1.600.000	-		
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.050.000	-	-	-	-	-	-	19.495.000	2.545.000	22.040.000	22.040.000	10.000		
4.xx.01.5.xx.01.24.	Program mengintensifkan perencanaan pengaduan masyarakat	33.785.000	-	-	-	-	-	-	30.065.000	3.710.000	33.775.000	33.775.000	10.000		
4.xx.01.5.xx.01.24.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	33.785.000	-	-	-	-	-	-	30.065.000	3.710.000	33.775.000	33.775.000	10.000		
4.xx.01.5.xx.01.24.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	825.000	-	-	-	-	-	-	825.000	-	825.000	825.000	-		
4.xx.01.5.xx.01.24.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.960.000	-	-	-	-	-	-	29.240.000	3.710.000	32.950.000	32.950.000	10.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L.S Gaji				SPJ - LS Baramj & Jasa				SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	6(4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	8	9(7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)		
5.xx.01.5.xx.01.36.	Program Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	81.874.000	-	-	-	-	-	-	62.510.000	16.077.000	78.587.000	78.587.000	3.287.000		
5.xx.01.5.xx.01.36.01.	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik Uang Lembur PNS	27.150.000	-	-	-	-	-	-	19.710.000	4.338.000	24.048.000	24.048.000	3.102.000		
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.03.01.	Belanja alat tulis kantor	1.152.000	-	-	-	-	-	-	-	1.095.000	1.095.000	1.095.000	57.000		
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.01.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	2.808.000	-	-	-	-	-	-	2.695.000	113.000	2.808.000	2.808.000	-		
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.550.000	-	-	-	-	-	-	1.550.000	-	1.550.000	1.550.000	3.000.000		
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Miryak/Gas dan pelumas	6.000.000	-	-	-	-	-	-	4.650.000	1.350.000	6.000.000	6.000.000	-		
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.250.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.250.000	2.250.000	2.250.000	-		
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.640.000	-	-	-	-	-	-	5.065.000	530.000	5.595.000	5.595.000	45.000		
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi	4.750.000	-	-	-	-	-	-	4.750.000	-	4.750.000	4.750.000	-		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramy & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9-12)	14(3-13)			
5.xx.01.5.xx.01.36.02.	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	24.715.000	-	-	-	-	-	-	20.875.000	3.805.000	24.680.000	24.680.000	35.000			
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.265.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	765.000	2.265.000	2.235.000	-			
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Miriyak/Gas	4.800.000	-	-	-	-	-	-	3.800.000	1.000.000	4.800.000	4.800.000	-			
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.650.000	-	-	-	-	-	-	15.575.000	2.040.000	17.615.000	17.615.000	35.000			
5.xx.01.5.xx.01.36.03.	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Keintimanan Masyarakat	16.335.000	-	-	-	-	-	-	11.540.000	4.720.000	16.260.000	16.260.000	75.000			
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.150.000	-	-	-	-	-	-	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.035.000	55.000			
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	345.000	-	-	-	-	-	-	-	345.000	345.000	345.000	-			
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Miriyak/Gas	7.200.000	-	-	-	-	-	-	5.200.000	2.000.000	7.200.000	7.200.000	-			
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000	600.000	1.000.000	1.000.000	-			
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.640.000	-	-	-	-	-	-	5.940.000	680.000	6.620.000	6.620.000	20.000			
5.xx.01.5.xx.01.36.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	13.674.000	-	-	-	-	-	-	10.385.000	3.214.000	13.599.000	13.599.000	75.000			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Baramng & Jasa		SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	2.447.500	
	Jumlah Pengeluaran :		1.085.785.327	103.413.330	1.189.198.657	-	-	496.352.536	99.132.792	1.784.693.985	
	Saldo Kas		-	-	-	-	10.300	(10.300)	-	-	



Sarilamak, 31 Desember 2019
Bendahara Pengeluaran

(Handwritten Signature)
H. SUPRAYONDI, S.Sos
NIP. 19650906 198602 1 002

**REALISASI PENDAPATAN PER 31 DESEMBER 2019
KECAMATAN BUKIK BARISAN**

NO	Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	KET
1	4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.500.000	1.173.000	-
	JUMLAH		10.500.000	1.173.000	

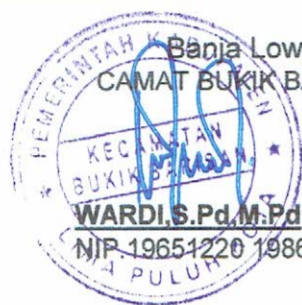
Banua Loweh, Januari 2020
CAMAT BUKIK BARISAN



WARDI.S.Pd.M.Pd
NIP.19651228 198603 1 005

**DAFTAR HUTANG JANGKA PENDEK
SKPD KECAMATAN BUKIK BARISAN
PER 31 JANUARI 2019**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	LISTRIK	107.340
2	AIR	
3	TELEPON	
	JUMLAH	107.340



Banja Loweh, Januari 2020
CAMAT BUKIK BARISAN

WARDI S. Pd. M. Pd
NIP. 19651220 198603 1 005

**DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2019
KECAMATAN BUKIK BARISAN**

NO	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
1		-	-	-
	JUMLAH		-	

Banja Loweh, Januari 2020
CAMAT BUKIK BARISAN


WARDI.S.Pd.M.Pd
NIP.19651220198603 1 005

REALISASI RINCIAN BELANJA MODAL
KECAMATAN BUKIT BARISAN
Kondisi Januari s/d Bulan Desember 2019

No	Kode Rekening	Belanja Modal	Jumlah	Satuan	harga (Rp)
1	.5.2.3.27.13	BM Pengadaan mesin Absensi(Ping	1	unit	5.675.000
2	.5.2.3.30.01	BM Meja Kerja	1	unit	15.500.000
3	.5.2.3.30.03	BM Pengadaan Kursi Kerja	1	unit	975.000
4	.5.2.3.30.07	BM Lemari arsip	1	unit	23.900.000
JUMLAH					46.050.000

Banja, Lohén, Januari 2020
CAMAT BUKIT BARISAN



WARDI.S.Pd.M.Pd

NIP. 196512201986031005

**DAFTAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PPh Ps 21 PPh Ps 23, PSL 22 dan PPN
PADA OPD Kecamatan BUKIK BARISAN
DARI BULAN Januari S/D Desember 2019**

NO	BULAN	PENERIMAAN					PENGELUARAN					Saldo
		PPn	PPh Ps 21	PPh Ps 22	PPH Ps 23	JUMLAH	PPn	PPh Ps 21	PPH Ps 22	PPH Ps 23	JUMLAH	
1	JANUARI	381.818	379.550	75.752	115.000	952.120					-	952.120
2	FEBRUARI		313.750	22.500	14.800	351.050	381.818	379.550	75.752	115.000	952.120	351.050
3	MARET		314.758		10.250	325.008		314.758	22.500	14.800	352.058	324.000
4	APRIL		356.577		302.700	659.277		356.577		10.250	366.827	616.450
5	MEI	136.364	7.462.308	20.455	7.950	7.627.077	136.364	7.776.058	20.455	310.650	8.243.527	-
6	JUNI		454.518		16.000	470.518		454.518		16.000	470.518	-
7	JULI	136.364	2.860.366			2.996.730	136.364	2.860.366			2.996.730	-
8	AGUSTUS		499.518		220.800	720.318		499.518		220.800	720.318	-
9	SEPTEMBER		3.994.198		1.191.900	5.186.098		3.994.198		1.191.900	5.186.098	-
10	OKTOBER	773.182	2.276.912	69.545		3.119.639	773.182	2.276.912	69.545		3.119.639	-
11	NOPEMBER	3.581.818	2.313.215	537.273	1.800	6.434.106	3.581.818	2.313.215	537.273	1.800	6.434.106	-
12	DESEMBER	1.267.171	4.247.954	88.636	512.700	6.116.461	1.267.171	4.247.954	88.636	512.700	6.116.461	-
	JUMLAH	6.276.717	25.473.624	814.161	2.393.900	34.958.402	6.276.717	25.473.624	814.161	2.393.900	34.958.402	-

Catatan :

Nama Pajak	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1. PPh Ps 21	25.473.624	25.473.624	-
2. PPh Ps 22	6.276.717	6.276.717	-
3. PPh Ps 23	814.161	814.161	-
4. PPh Ps 23	2.393.900	2.393.900	-
Jumlah	-	-	-



CAMAT BUKIK BARISAN

WARDI.S.Pd/M.Pd

NIP. 19651220 198603 1 005

Banja Loweh,
Bendahara Pengeluaran

H.SUPRAYONDI.S.Sos

NIP. 19650906 198602 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN BUKIK BARISAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Rekenin 64/2013	No.	Uraian	2019	2018
1	2	3		
8		KEGIATAN OPERASIONAL		
		PENDAPATAN - LO	1.173.000,00	1.530.000,00
8.1	I		1.173.000,00	1.530.000,00
8.1.1	1	Pendapatan Pajak Daerah - LO		
8.1.2	2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.173.000,00	1.530.000,00
8.1.3	3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		
8.1.4	4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		
8.2	II			
8.2.1	1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN		
8.2.1.01	1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		
8.2.1.02	1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
8.2.1.03	1.3	Dana Alokasi Umum		
8.2.1.04	1.4	Dana Alokasi Khusus		
8.2.2	2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
8.2.2.01	2.1	Dana Otonomi Khusus		
8.2.2.03	2.2	Dana Penyesuaian		
8.2.3	3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
8.2.3.01	3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		
8.2.3.01.01	3.1.1	BH Pajak Kendaraan Bermotor		
8.2.3.01.02	3.1.2	BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
8.2.3.01.03	3.1.3	BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
8.2.3.01.04	3.1.4	BH Pajak Air Permukaan		
8.2.3.01.05	3.1.5	BH Pajak Rokok		
8.2.3.02	3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
8.3	III			
8.3.1	1	Pendapatan Hibah		
8.3.2	2	Pendapatan Dada Darurat		
		JUMLAH PENDAPATAN	1.173.000,00	1.530.000,00
9		BEBAN	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31
9.1		BEBAN OPERASI - LO		
9.1.1			1.177.714.583,00	1.086.223.569,00
9.1.1.01		BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN - LO	907.871.445,00	890.275.774,00
	1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	596.317.700,00	577.197.500,00
	2	Tunjangan Keluarga-LO	48.110.237,00	50.500.726,00
	3	Tunjangan Jabatan-LO	58.620.000,00	66.600.000,00
	4	Tunjangan Fungsional-LO		
	5	Tunjangan Fungsional Umum-LO	10.860.000,00	10.860.000,00
	6	Tunjangan Beras-LO	29.040.420,00	33.168.360,00
	7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	390.459,00	46.291,00
	8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian-LO	5.724.632,00	
	9	Gaji ke tiga belas	79.533.872,00	
	10	Tunjangan hari raya	79.274.125,00	
	11	Pembulatan Gaji - LO		74.939.902,00
	12	Iuran Jaminan Kesehatan-LO		76.962.995,00
	13	Uang Paket-LO		
	14	Tunjangan Badan Musyawarah-LO		
	15	Tunjangan Komisi-LO		
	16	Tunjangan Badan Anggaran-LO		
	17	Tunjangan Badan Kehormatan-LO		
	18	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya-LO		
	19	Tunjangan Perumahan-LO		
	20	Uang Duka Wafat/Tewas-LO		
	21	Uang Jasa Pengabdian-LO		
	22	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD-LO		
	23	Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit-LO		
9.1.1.02		BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS - LO	261.172.138,00	186.619.795,00
	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	261.172.138,00	186.619.795,00
	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas-LO		
	3	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO		
	4	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi-LO		
	5	Tambahan penghasilan guru-LO		
	6	Tunjangan profesi guru-LO		
9.1.1.03		BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA	-	-
	1	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO		
	2	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH-LO		
9.1.1.04		BEBAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	-	-
	1	Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan-LO		

9.1.1.05	2	Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan-LO	-	-
		INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - LO	-	-
9.1.1.06	1	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel-LO	-	-
	2	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran-LO	-	-
	3	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan-LO	-	-
	4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame-LO	-	-
	5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan-LO	-	-
	6	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah-LO	-	-
	7	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang	-	-
	8	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak	-	-
	9	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi	-	-
10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea	-	-	
9.1.1.07		INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - LO	-	-
	1	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan-LO	-	-
	2	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -	-	-
	3	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar-LO	-	-
	4	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian	-	-
	5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -	-	-
	6	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -	-	-
	7	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal-LO	-	-
	8	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat	-	-
	9	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin	-	-
	10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan-LO	-	-
11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek-LO	-	-	
9.1.1.07		UANG LEMBUR - LO	8.671.000,00	9.328.000,00
	1	Uang Lembur PNS-LO	8.671.000,00	9.328.000,00
	2	Beban Uang Lembur Non PNS-LO		
9.1.2		BEBAN PERSEDIAAN	65.126.900,00	66.539.200,00
9.1.2.01		BEBAN BAHAN PAKAI HABIS	65.126.900,00	66.539.200,00
9.1.2.02	1	Beban alat tulis kantor-LO	22.378.900,00	20.020.200,00
	2	Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO		
	3	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery	2.380.000,00	1.291.000,00
	4	Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO	1.800.000,00	1.800.000,00
	5	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	7.168.000,00	4.028.000,00
	6	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO	19.400.000,00	15.600.000,00
	7	Beban pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien)-LO		
	8	Beban peralatan/perengkapan kantor pakai habis-LO		
	9	Beban Peralatan Dokter Pakai Habis-LO		
	10	Beban Peralatan Laboratorium Pakai Habis-LO		
	11	Beban Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga)-LO		
	12	Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO	12.000.000,00	23.000.000,00
	13	Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO		
	14	Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO		
	15	Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,		800.000,00
9.1.2.02		BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL- LO	-	-
	1	Beban Bahan baku bangunan-LO		
	2	Beban Bahan/bibit tanaman-LO		
	3	Beban Bibit ternak / ikan-LO		
	4	Beban Bahan obat-obatan-LO		
	5	Beban Bahan kimia-LO		
	6	Beban Bahan Material Pameran-LO		
	7	Beban Bahan Material Keterampilan-LO		
	8	Beban kelengkapan kerja lapangan-LO		
	9	Beban Bahan Percontohan-LO		
	10	Beban Bahan Percobaan-LO		
	11	Beban Bahan Penguji Kendaraan-LO		
12	Beban Bahan Makanan Ternak-LO			
		BEBAN JASA	257.363.900,00	334.337.690,00
9.1.2.03		BEBAN JASA KANTOR	2.233.920,00	59.662.240,00
9.1.2.03	1	Beban jasa telepon-LO		
	2	Beban jasa air-LO	402.140,00	76.000,00
	3	Beban jasa listrik-LO	1.731.780,00	1.564.240,00
	4	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang-LO		

	5	Beban jasa surat kabar/majalah-LO		
	6	Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO		
	7	Beban jasa paket/pengiriman-LO		
	8	Beban jasa Sertifikat-LO	100.000,00	100.000,00
	9	Beban jasa Transaksi Keuangan-LO		
	10	Beban jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,		57.922.000,00
	11	Beban Belanja Pendidikan (SPP)-LO		
	12	Beban Pajak Bumi dan Bangunan-LO		
	13	Beban jasa Pembangunan Sistem Jaringan-LO		
	14	Beban jasa Pengganti Transportasi-LO		
	15	Beban jasa Akomodasi dan Konsumsi-LO		
	16	Beban Belanja Bulanan-LO		
	17	Beban jasa Laboratorium-LO		
		Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien-LO		
	18			
	19	Belanja Pemuda-LO		
	20	Belanja Olahraga-LO		
	21	Belanja Pariwisata-LO		
9.1.2.04		BEBAN PREMI ASURANSI	-	-
		Beban jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat-LO		
	1			
	2	Beban jasa Asuransi Barang Milik Daerah-LO		
	3	Beban jasa Premi Asuransi Jiwa-LO		
	4	Beban jasa Pelayanan Kesehatan-LO		
9.1.2.05		BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	68.803.980,00	80.714.950,00
	1	Beban jasa Jasa Service-LO	3.663.000,00	4.908.800,00
	2	Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	21.390.980,00	30.111.500,00
		Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	42.000.000,00	43.950.000,00
	3			
	4	Beban Belanja Jasa KIR-LO		
	5	Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	1.750.000,00	1.744.650,00
9.1.2.06		BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN	17.571.000,00	15.391.000,00
	1	Beban Belanja cetak-LO	6.930.000,00	5.610.000,00
	2	Beban Belanja Penggandaan-LO	9.617.000,00	9.111.000,00
	3	Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO	1.024.000,00	670.000,00
	4	Beban Buku		
9.1.2.07		BEBAN SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	-	-
	1	Beban Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas-LO		
	2	Beban Belanja sewa gedung/ kantor/tempat-LO		
	3	Beban Belanja sewa ruang rapat/pertemuan-LO		
	4	Beban Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar		
9.1.2.08		BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS	-	-
	1	Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO		
9.1.2.10		BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	7.520.000,00	9.225.000,00
	1	Beban Belanja sewa meja kursi-LO		
	2	Beban Belanja sewa tenda-LO	2.520.000,00	5.225.000,00
	3	Beban Belanja sewa pakaian adat/tradisional-LO		
	4	Beban Belanja sewa sound system-LO	5.000.000,00	4.000.000,00
		Beban Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias-LO		
	5			
	6	Beban Belanja sewa peralatan khusus-LO		
	7	Beban Belanja Sewa Senjata Api-LO		
9.1.2.11		BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN	44.450.000,00	52.154.500,00
	1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO		
	2	Belanja makanan dan minuman rapat-LO	40.950.000,00	48.224.500,00
	3	Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO	1.250.000,00	1.250.000,00
	4	Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO	2.250.000,00	2.680.000,00
	5	Beban Belanja makanan dan minuman pasien-LO		
9.1.2.12		BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	7.000.000,00	-
	1	Beban Pakaian Dinas KDH/WKDH		
	2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)-LO		
	3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO		
	4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO	7.000.000,00	
	5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO		
	6	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)-LO		
9.1.2.13		BEBAN PAKAIAN KERJA	-	-
	1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan-LO		
9.1.2.14		BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	-	-
	1	Belanja pakaian KORPRI-LO		
	2	Beban Belanja pakaian adat daerah-LO		
	3	Belanja pakaian Olahraga-LO		
	4	Beban Belanja pakaian Paskibraka-LO		
	5	Beban Belanja Pakaian Peserta-LO		
9.1.2.24		HONORARIUM NON PNS	53.110.000,00	50.590.000,00
		Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO	6.550.000,00	10.950.000,00
	1			
	2	Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap-LO		
	3	Beban Honorarium moderator-LO		1.550.000,00

	4	Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO		200.000,00
		Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO		600.000,00
	5			
	6	Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO		200.000,00
		Beban Honorarium Penceramah Agama / Konselor-LO		
	7			
	8	Beban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LO		1.500.000,00
	9	Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	14.700.000,00	12.250.000,00
	10	Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	31.860.000,00	23.340.000,00
	11	Beban Belanja Jasa Konsultansi Penelitian-LO		
	12	Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LO		
	13	Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan-LO		
	14	Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO		
	15	Beban Belanja Jasa Konsultansi Pendataan-LO		
	16	Beban Honorarium Petugas Kebersihan-LO		
		Beban Honorarium buruh/tukang/mechanik/mandor-LO		
	17			
	18	Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)-LO		
	19	Beban jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa		
9.1.2.25		HONORARIUM PNS	56.675.000,00	66.600.000,00
	1	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO		
	2	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO	325.000,00	
	3	Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Barang dan Jasa-LO	250.000,00	
	4	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO		
	5	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna	11.400.000,00	11.400.000,00
	6	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00
	7	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	23.700.000,00	24.900.000,00
	8	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan	9.000.000,00	9.000.000,00
	9	Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO		
		Beban Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga-LO		
	10			
	11	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO		
	12	Beban Belanja sosialisasi-LO	6.000.000,00	15.300.000,00
	13	Beban Belanja bimbingan teknis-LO		
		Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator-LO		
	14			
9.1.2.27		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-
	1	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	-	-
	2	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	-	-
9.1.2.18		BEBAN PEMELIHARAAN	2.540.000,00	2.540.000,00
		Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-LO		
	1	Beban Belanja Pemeliharaan Jalan-LO		
	2	Beban Belanja Pemeliharaan Jembatan-LO		
	3	Beban Belanja Pemeliharaan Gedung/Ruangan/Dinding-LO		
	4	Beban Belanja Pemeliharaan Atap/Loteng-LO		
	5	Beban Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir-LO		
	6	Beban Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen-LO		
	7	Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO	2.540.000,00	2.540.000,00
	8	Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi-LO		
	9	Beban Belanja Pemeliharaan Mesin Foging-LO		
	10	Beban Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman-LO		
9.1.2.15		BEBAN PERJALANAN DINAS	198.282.200,00	170.500.675,00
	1	Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO	169.315.000,00	142.020.000,00
	2	Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	28.967.200,00	28.480.675,00
	3	Beban perjalanan dinas luar negeri		
		BEBAN LAIN-LAIN	-	-
9.1.5		BEBAN HIBAH	-	-
9.1.5.04		BEBAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	-	-
	1	Beban Belanja hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat-LO		
	2	Beban Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan		
	3	Beban Belanja hibah kepada kelompok tani-LO		
	4	Beban Belanja hibah kepada kelompok perikanan-LO		
	5	Beban Belanja Hibah yang kepada masyarakat-LO		
	6	Beban Belanja Barang Untuk Pertanian-LO		
	7	Beban Belanja Barang Untuk Kehutanan-LO		

9.1.5.05	8	Beban Belanja Barang dan jasa yang akan diserahkan		
		BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKA	-	-
	1	Beban Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO		
	2	Beban Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO		
	3	Beban Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi-LO		
9.1.6		BEBAN BANTUAN SOSIAL	-	-
9.1.6.01		BEBAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI	-	-
	1	Beban Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan		
	2	Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau		
	3	Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau		
	4	Beban Belanja Tidak Terduga-LO		
9.1.7		BEBAN PENYUSUTAN	66.815.200,95	74.922.756,31
	6	Beban penyusutan	66.815.200,95	74.922.756,31
9.2		BEBAN TRANSFER	-	-
	1	Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO		
	2	Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah		
	3	Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah		
	4	Beban Belanja Bantuan Kepada Partai Politik-LO.		
	5	Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada		
		JUMLAH BEBAN	1.767.842.783,95	1.735.063.890,31

Mutasi Tambah AT (Diluar BM 2018)

2018	Tambah	Kurang	2019
1 TANAH			
30.000.000			
BM 2015			
BM Tidak dikapitalisir			
Mutasi kurang SKPD ...			
2 PM			
BM PM	46.050.000		
BM Tidak dikapitalisir	-		
Mutasi kurang SKPD K-R2	-		
Mutasi dari SKPD K-R4	-		
3 G & B			629.554.550
629.554.550,00			
BM2020			
Kapitalisasi Bel. B & J Pemeliharaan G&T	-		
Kapitalisasi Bel. B & J Pemeliharaan G&T	-		
Kapitalisasi Bel. B & J Pemeliharaan G&T	-		
Mutasi Antar SKPD	-		
4 JIJ			
3.000.000			3.000.000
BM2015			3.000.000
Mutasi kurang SKPD K-R2			
Mutasi Tambah dari SKPD K-R4			
Kapitalisasi BBJ			

5 AT Lainny

	-	-
BM2015		
Mutasi kurang SKPD K-R2		
Mutasi Tambah dari SKPD K-R4		

	-	-
BM		46.050.000
Rekap +/-Aset		-

